

KURIKULUM DARI MASA KE MASA (Telaah Atas Pentahapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia)

Oleh: Fitri Wahyuni*

Abstract: *The curriculum is an important element in any form and models of education. Since the days of Dutch colonizers in Indonesia there were already implemented in the curriculum of formal education. Curriculum development in Indonesia there are 2 periods of ; 1) The period before independence day 2) The period after independence day. In the course of history since independence in 1945, the national curriculum has changed, namely in 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 and that is still the stage of completion is curriculum 2013. The changes are a logical consequence of the change of political, system, social, cultural, economic, science and technology in society and nation.*

Keywords: *Kurikulum Pendidikan Indonesia*

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan. Sejalan dengan perkembangan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara formal, kurikulum sejak zaman Belanda sudah diterapkan di sekolah, artinya kurikulum juga sudah ada.

Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan dan persekolahan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan Belanda; begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Belanda misalnya dengan memmanfaatkannya pribumi untuk mengeruk kekayaan alam seoptimal mungkin; sedangkan Jepang dikenal dengan Asia Timur Raya dalam membantu misinya dalam peperangan.

* Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah INSURI Ponorogo

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di tanah Air terus berkembang, termasuk perhatian Pemerintah dalam hal perkembangan kurikulum. Sehubungan dengan itu, perkembangan kurikulum di Indonesia ada 2 periode (1) Periode sebelum kemerdekaan/ penjajahan, (2) Periode sesudah kemerdekaan.

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan yang sekarang 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

PENGERTIAN KURIKULUM

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani berasal dari kata *curir* yang berarti pelari, dan *curere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan.

Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu, kurikulum diartikan merupakan aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk didalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran.

Oemar Hamalik melihat kurikulum dari beberapa tafsiran sebagai berikut: 1) Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, 2) Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan 3) Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran yang yang berarti dalam kurikulum terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh serta dipelajari oleh siswa selama mengikuti kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Dalam pandangan ini mata pelajaran merupakan pengalaman orang tua atau orang-orang pandai masa lalu yang telah tersusun secara rasional, logis dan sistematis.

Kurikulum sebagai rencana pembelajaran merupakan suatu program dan rencana pendidikan yang disesuaikan untuk membelajarkan siswa. Dengan program dan rencana yang telah dibuat siswa melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan dan merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rencana pembelajaran yang dibuat guru harus merancang keterlibatan siswa secara aktif untuk melakukan aktivitas belajar.

Kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dalam hal ini kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar serta mengembangkan kecakapan hidup siswa. Kurikulum sebagai pengalaman belajar mengisyaratkan bahwa kegiatan belajar tidak hanya berlangsung dalam ruangan kelas, akan tetapi juga bisa berlangsung di luar ruangan kelas. Dengan demikian semua kegiatan belajar yang dilakukan baik di dalam ruangan kelas maupun di luar kelas disebut kurikulum.¹

Dari beberapa pengertian di atas maka kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa.

SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa yaitu pada masa kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan.

Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia, pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis.

Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti tersendiri bagi bangsa Indonesia yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang.² Pada masa ini munculah sekolah rakyat yang disebut *Kokumin Gako* selama 6 tahun

¹ Darwyn Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 10-12.

² Sukardjo, M., dkk; *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*; (Jakarta: 2012), 143.

lamanya, selanjutnya pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.³

2. Periode Sesudah Kemerdekaan

a. Kurikulum 1947

Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan *leer plan* (rencana pelajaran) ketimbang istilah *curriculum* dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan dengan gejolak perang revolusi, maka Rencana Pelajaran 1947, baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu Rencana Pelajaran 1947 sering juga disebut kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya.

Rencana Pelajaran 1947 lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat, daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Mata pelajaran untuk tingkat Sekolah Rakyat ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar, Menulis, Seni Suara, Pekerjaan Tangan, Pekerjaan Keputrian, Gerak Badan, Kebersihan dan Kesehatan, Didikan Budi Pekerti, dan Pendidikan Agama. Pada awalnya pelajaran agama diberikan mulai kelas IV, namun sejak 1951 agama juga diajarkan sejak kelas 1.

Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Ilmu Alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana (pompa, timbangan, manfaat bes berani), dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari, misalnya mengapa lokomotif diisi air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran Terurai 1952. "Silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru mengajar satu mata pelajaran". Pada masa itu juga dibentuk Kelas Masyarakat yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR 6

³ Idi Abdullah, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*; (Yogyakarta : Ar-Ruzz, 2007), 16-19.

tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.

b. Kurikulum 1952

Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

c. Kurikulum 1964

Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

d. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila

sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

e. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

f. Kurikulum 1984 (Kurikulum CBSA)

Kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL).

Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa.

g. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam satu tahun menjadi tiga tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah.

h. Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

Kurikulum Berbasis Kompetensi berorientasi pada:

1. Hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna.
2. Keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan yang ingin dicapai menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.

Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi.

i. Kurikulum 2006 (KTSP)

Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan kerangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.⁴

j. Kurikulum 2013

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi

⁴ Taqvim Islami, *Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia*, <http://taqwimislami.com/index.php/en/57-kurikulum/297-sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia>, diunduh pada rabu, 23 April 2014

yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, ketrampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik.

Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik Kurikulum 2013, yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat.⁵

PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan kurikulum madrasah mengalami beberapa periode yaitu:

1. Periode Sebelum Kemerdekaan

Pada periode ini sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam Al-qur'an dan pengajian kitab yang diselenggarakan di rumah-rumah, surau, masjid, pesantren, dan lain-lain pada perkembangannya selanjutnya mengalami perubahan bentuk baik dari segi kelembagaan, materi pengajaran atau kurikulum, metode maupun struktur organisasinya sehingga melahirkan suatu bentuk yang baru yang disebut madrasah.

⁵ Imam. <http://imam2992.blogspot.com/2013/11/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.htm>

2. Periode Setelah Kemerdekaan

Pada periode ini setelah Indonesia merdeka maka dibentuklah Departemen Agama yang akan mengurus masalah keberagaman di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan, khususnya madrasah. Namun pada perkembangan selanjutnya, madrasah walaupun sudah berada di bawah naungan Departemen Agama tetapi hanya sebatas pembinaan dan pengawasan.⁶

Rentang waktu pendidikan Islam telah berjalan lama dan mempunyai jalan panjang.⁷ Namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih dari sistem pendidikan nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya SKB 3 Menteri.

3. Pada Masa SKB 3 Menteri

Dengan diterbitkannya SKB 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB 3 Menteri ini dikeluarkan pada 24 Maret 1975, yang berusaha mengembalikan ketertinggalan pendidikan Islam untuk memasuki mainstream pendidikan nasional, kebijakan ini menjadikan madrasah setara dan sederajat dengan sekolah umum lainnya. Guna memenuhi tuntutan SKB 3 Menteri, oleh karena itu perlu diadakan pembinaan serta pembaharuan kurikulum secara menyeluruh, untuk itu telah diadakan berbagai usaha, penyusunan metode mengajar, standarisasi buku-buku madrasah dan alat-alat pelajaran. Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya (a) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat., (b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya., (c) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat., (d) Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

⁶ Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2011), 293.

⁷ Fadjar Malik, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*; (Bandung : Mizan, 1998), xi.

Dibawah ini akan dikemukakan langkah-langkah pokok pengembangan, strategi penyusunan dan susunan kurikulum madrasah.⁸ Langkah-langkah pokok yang ditempuh dalam pengembangan kurikulum madrasah adalah:

- a. Perumusan tujuan-tujuan institusional.
- b. Penentuan struktur program kurikulum.
- c. Penyusunan garis-garis besar program pengajaran, masing-masing dari setiap bidang studi, perumusan tujuan-tujuan instruksional dan identifikasi pokok-pokok bahan yang dijadikan program pengajaran.
- d. Penyusunan dan penggunaan satuan pelajaran, program penilaian, program bimbingan dan penyuluhan, program administrasi serta supervisi.

Langkah-langkah tersebut diatas telah mendasari sifat-sifat dalam rangka pengembangan dan pembaharuan pendidikan yang selaras dan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pengembangan dan pembinaan kurikulum madrasah secara nasional agar madrasah dapat menjalankan SKB 3 Menteri dan mencapai cita-cita agama islam dalam pembentukan insan yang berkepribadian muslim, yang antara lain perlu kita perhatikan adalah tentang bidang studi apa yang akan disampaikan didalam suatu madrasah.⁹

4. Pada Masa Pasca UU No. 20/2003 dan UU No. 2 Tahun 1989

Setelah lahirnya UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berbeda dengan Undang-undang kependidikan sebelumnya, Undang-undang ini mencakup ketentuan tentang semua jalur dan jenis pendidikan. Jika pada Undang-undang pendidikan Nasional bertumpu pada sekolah, maka dalam UUSBN ini pendidikan nasional mencakup jalur sekolah dan luar sekolah, serta meliputi jenis-jenis pendidikan akademik, pendidikan professional, pendidikan kejuruan dan pendidikan agama.¹⁰

Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 137.

⁹ *Ibid.*, 138

¹⁰ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta : Golden Terayon Press, 1994)

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di Madrasah adalah pendidikan agama Islam, yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.¹¹

PENUTUP

Kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa.

Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia mengalami 2 periode yaitu: (a) Periode sebelum kemerdekaan yaitu pada masa penjajahan bangsa Eropa baik Portugis maupun Belanda dan dilanjutkan pada masa penjajahan Jepang, awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah dan berdagang tetapi pada akhirnya mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk golongan mereka maupun pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis yang nantinya akan dipekerjakan pada pemerintahan dan gereja. (b) Periode Sesudah Kemerdekaan Kurikulum pendidikan di Indonesia sering berubah setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006.

Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

Perkembangan kurikulum pendidikan islam di Indonesia ; (a) Periode Sebelum Kemerdekaan. (b) Periode Sesudah Kemerdekaan., (c) Periode SKB 3 Menteri., dan (c) Periode Pasca UU No. 20/2003 dan UU No. 2 Tahun 1989

¹¹ Gunawan, Sistem Pendidikan Nasional <http://gunawanpunyablog.wordpress.com/2012/10/25>

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Ar-Ruzz; 2007.
- <http://gunawanpunyablog.wordpress.com/2012/10/25>
- <http://imam2992.blogspot.com/2013/11/perkembangan-kurikulum-di-indonesia.htm>
- <http://taqwimislamy.com/index.php/en/57-kurikulum/297-sejarah-perkembangan-kurikulum-di-indonesia>, diunduh pada rabu, 23 April 2014.
- Malik Fadjar. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*. Bandung : Mizan, 1998.
- Samsul Nizar. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta : Kencana,
- Sukardjo, dkk. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syah Darwyn. *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Syarifudin Nizar dan Usman M. Basyirudin. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum..* Jakarta : Ciputat Pres, 2002.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.
- Zakiah Daradjat, dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM MELALUI TUGAS TERSTRUKTUR DI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI AGAMA

Oleh: Munawir*

Abstract: *The purpose of learning in every course is to get the best successful achievement. Because of that, it is necessary to have the earnest effort to get it, such as creating effectif ways in all of the activity through structured task, that arrange in such a way. Thus, it is expected that good planning, will get good results. This research involved 88 students from Syari'ah major, that follow the course. Structured tasks carried out in a number of stages that include the design phase, the implementation phase in the classroom, and the assessment phase (evaluation). Each phase will be done strictly and neat, which is expected to obtain a satisfactory result.*

Keywords: *the outcomes of learning, Jurisprudence, Structured task*

PENDAHULUAN

Dari sejumlah pengalaman selama beberapa kali mengajar Pengantar Ilmu Hukum, dirasakan adanya suatu kebutuhan mahasiswa untuk memiliki buku pegangan dalam belajar. Kondisi ini tercermin dari banyaknya variabel-variabel di bidang Ilmu Hukum yang perlu untuk dijadikan contoh dalam proses pembelajaran.

Hasil pengamatan di perpustakaan menunjukkan bahwa tidak tersedianya buku-buku Ilmu Hukum yang mencukupi kebutuhan semua mahasiswa. Khususnya bagi mereka yang pada saat itu sedang belajar materi mengenai Ilmu Hukum. Sehingga banyak diantara mereka harus menunggu beberapa hari untuk mendapatkan buku mengenai Ilmu Hukum.

Di sisi lain, buku-buku yang adapun belum maksimal dimanfaatkan oleh mahasiswa. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain : banyaknya notasi yang berbeda antara buku satu dengan yang lain, tingkat penyerapan yang rendah karena banyak contoh di luar bidang Ilmu Hukum, buku-buku yang kuno sehingga kurang menimbulkan minat untuk membaca,

* Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo